

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidik merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Sumber daya manusia yang baik merupakan cerminan dari kemajuan suatu negara, salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia di suatu negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada didalam suatu negara.

Kualitas pendidikan merupakan tolak ukur majunya suatu bangsa sehingga pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas. Suatu negara tidak akan maju jika kualitas pendidikan warga negara tersebut rendah, sebaliknya jika negara yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi atau baik maka negara tersebut akan menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan itu diperlukan suatu tujuan pendidik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis dan tanggung jawab”.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19 tentang sistem pendidikan nasional mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam implementasinya kurikulum haruslah selalu dikembangkan dan diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan pendidikan. Perkembangan kurikulum dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan juga sebagai pedoman untuk pendidikan yang lebih baik. Dalam perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1945, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEK dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam implementasinya.

Pemerintah berpandangan bahwa saat ini pendidikan di Indonesia membutuhkan kurikulum yang berbasis pada kompetensi sekaligus berbasis pada karakter, yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk itu pemerintah menetapkan Kurikulum 2013 sebagai pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang lebih menekankan pendidikan karakter sebagaimana yang dibutuhkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Dengan perubahan kurikulum ini pemerintah berharap agar generasi bangsa Indonesia tidak hanya berkualitas dalam pengetahuan dan keterampilan namun juga berkarakter sehingga mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Guna menjamin tercapainya suatu kurikulum, pemerintah harus turut serta dalam penerapannya. Pembentukan suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi tercapai mutu pendidikan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) adalah salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam implementasi kurikulum 2013. Standarisasi pendidikan di Indonesia diatur dalam PP No 19 tahun 2005 yang diperbaharui dalam PP No 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan, standar ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. Standar ini mencakup Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan. Dalam implementasinya kurikulum 2013 cukup banyak mengalami masalah hingga pemerintah membuat suatu keputusan bahwa kurikulum 2013 hanya diterapkan pada sekolah yang sudah dianggap sanggup dan mampu untuk menerapkan kurikulum 2013. Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 022/H/KR/2015 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013. Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 di Kota Medan di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri sebanyak sepuluh sekolah yaitu : SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 16, SMAN 18, SMAN 20, sedangkan sebelas Sekolah Menengah Negeri lainnya yang berada di kota Medan masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemilihan sepuluh SMA negeri ini dikarena pemerintah menganggap kesepuluh SMA tersebut sudah mampu menerapkan kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 memuat empat elemen perubahan, yaitu perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian (Kemendikbud 2012). Salah satu standar pendidikan yang penting adalah standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Permendikbud No 65 Tahun 2013). Standar proses digunakan sebagai pedoman guru dalam pengelolaan pembelajaran karena berisi tentang standar minimal mengenai proses pembelajaran yang harus dilakukan. Meskipun telah disediakan panduan berupa standar proses, kesuksesan penerapannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan standar proses tersebut dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 memiliki ciri khas, antara lain kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik; pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu; dan penanaman pendidikan karakter yang merupakan bagian dari standar proses. Kurikulum 2013 yang memiliki ciri khas tersebut belum dianalisis bagaimana implementasinya di sekolah yang menjadi piloting kurikulum 2013. Menurut Mulyasa (2013), salah satu kunci sukses dan berhasilnya kurikulum 2013 ditentukan oleh kreativitas guru dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, peran guru dalam implementasi kurikulum sangat penting. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran geografi dikelompokkan pada rumpun Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-ilmu Sosial sehingga kajiannya lebih diarahkan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh dinamika alam dan segala gejalanya. Sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi, mata pelajaran Geografi ditetapkan

memiliki empat buah Kompetensi Inti (KI) yaitu kompetensi aspek menghayati dan mengamalkan ajaran agama, kompetensi aspek afektif, kompetensi aspek kognitif, dan kompetensi aspek psikomotor. Oleh karena itu pembelajaran geografi harus dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kurikulum 2013.

SMA Negeri 5 Medan dalam pengimplementasian guru geografi dituntut untuk membuktikan keprofesionalannya, mereka dituntut untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan kompetensi Inti (KI) yang dapat digali dan dikembangkan oleh peserta didik. Guru geografi tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi juga harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira penuh semangat dan berani mengemukakan pendapat, dengan demikian peserta didik di SMA Negeri 5 Medan tidak saja memiliki jumlah pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai tetapi juga sikap dan karakter sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia yang multikultur. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi stakurikulum 2013 pada pembelajaran Geografi di SMA Negeri 5 Medan dengan fokus penelitian standar proses

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 1) SMA Negeri 5 Medan merupakan sekolah induk yang mengimplementasikan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013/2014, 2) sejak tahun pertama pengimplementasian kurikulum

2013 di SMA Negeri 5 Medan masih harus dilakukan perbaikan demi perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran geografi untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) yang diharapkan, 3) pengimplementasian kurikulum 2013 pada pembelajaran geografi khususnya pada standar proses.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka ruang lingkup masalah yang akan diteliti dibatasi pada Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Geografi di SMA Negeri 5 Medan T.A 2016/2017 berdasarkan standar proses.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Geografi di SMA Negeri 5 Medan T.A 2016/2017 berdasarkan standar proses?

E. Tujuan Penelitian

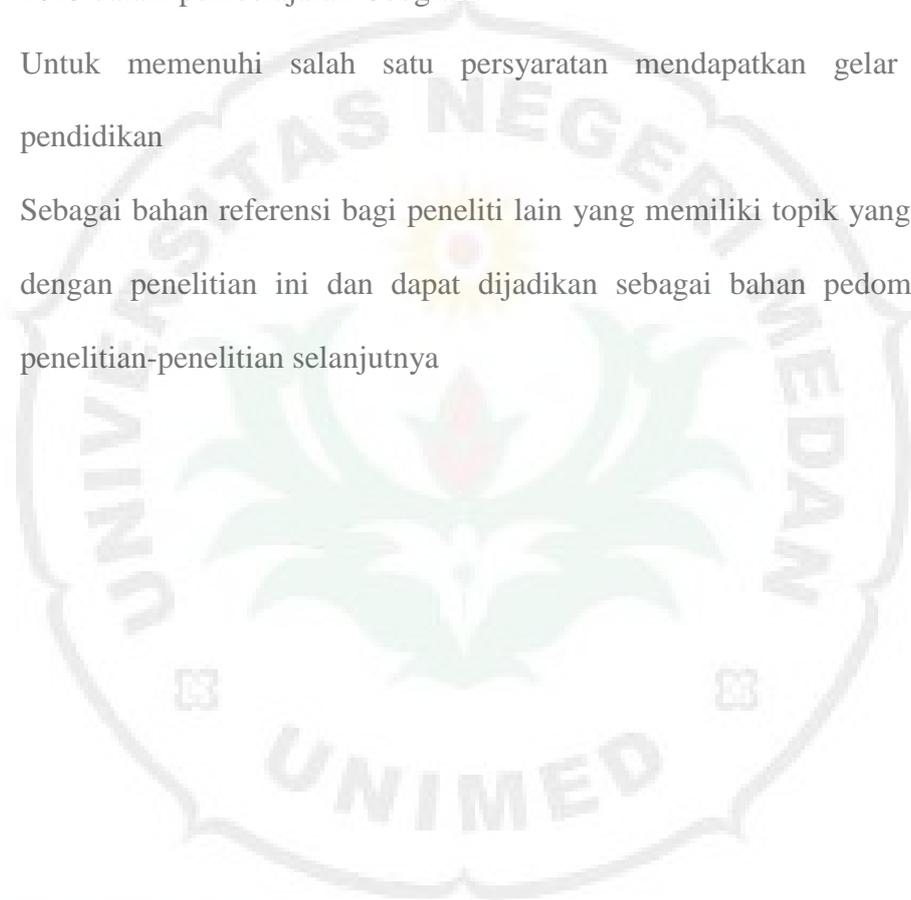
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran geografi di SMA Negeri 5 Medan T.A 2016/2017 berdasarkan standar proses.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dijadikan pertimbangan dan pedoman dalam penerapan kurikulum 2013 khususnya dalam pembelajaran geografi

2. Sebagai masukan bagi para guru bidang studi Geografi di sekolah yang menjadi tempat penelitian.
3. Sebagai umpan balik bagi siswa, guru, dan semua pelaksana kurikulum 2013 dalam pembelajaran Geografi.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan
5. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki topik yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya



THE
Character Building
UNIVERSITY